

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Adanya kesadaran dari Pemerintah Cina terhadap pentingnya kerjasama perdagangan dan ekonomi terbuka mendorong Cina melakukan reformasi ekonomi yang dimulai pada tahun 1979. Sejak saat itu Cina terus melakukan reformasi dalam berbagai bidang. Beberapa diantaranya adalah *open door policy* , sistem perbankan, serta dalam mendukung hal tersebut Cina juga menggunakan sistem finansial sebagai alat proteksi ekonomi yang dianalisa menggunakan pendekatan neo-merkantilisme. Dalam kebijakan *open door policy* juga Cina melakukan pembagian terhadap konsentrasi produksi dalam dua wilayah yaitu *Blue* (pesisir) dan *Yellow* (daratan) Cina, serta membuat adanya Zona Ekonomi untuk dapat meningkatkan ekspor sesuai dengan paradigma *export led growth* yang dianut oleh Cina dan untuk meningkatkan investor di Cina. Pada tahun 1980-an cadangan devisa Cina meningkat karena adanya peningkatan dalam volume ekspor maupun investasi asing, sehingga nilai tukar RMB menjadi *overvalued*. Saat nilai tukar Cina *overvalued* Cina memanfaatkan hal tersebut untuk membeli alat-alat produksi dari negara dengan nilai mata uang yang lebih rendah dan menyulitkan eksportir Cina. Sehingga Pemerintah Cina melakukan mereformasi baik pada level dan rezim mata uangnya. Selain itu, devaluasi mata uang juga dilakukan untuk membantu eksportir dan membuat barang ekspor Cina lebih kompetitif dalam pasar global.

Pada tahun 1979, Cina juga mulai melakukan perdagangan dengan AS dan beberapa negara lain. Sejak tahun 1984 sendiri AS menjadi mitra dagang terbesar ketiga bagi Cina dan perdagangan dari AS-Cina selalu mengalami surplus. Pemerintah AS sendiri sangat kooperatif dalam meningkatkan kerjasama perdagangan antara AS-Cina, hal tersebut dikarenakan Pemerintah AS melihat Cina sebagai negara yang memiliki potensi besar bagi pasar AS. Namun, sejak tahun 1995 perdagangan AS-Cina mulai mengalami *trade imbalance*. Tahun 2000, *US Treasury* mulai menyelidiki tentang hal ini, saat itu ada tuduhan bahwa Cina telah melakukan “manipulasi” terhadap mata uangnya. *US Treasury* saat itu masih belum menetapkan Cina sebagai salah satu negara yang “memanipulasi” mata uang. Namun, defisit perdagangan antara AS-Cina dari tahun ke tahun semakin membesar dan menyebabkan adanya peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 2.7 Juta Orang di AS sejak tahun 2001-2011. Sejak defisit perdagangan membesar, *US Treasury* mulai serius melakukan analisa mengenai “manipulasi” mata uang Cina dengan melaporkan ke IMF. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh IMF menggunakan tiga pendekatan yaitu dengan menggunakan pendekatan *Equilibrium Real Exchange Rate* (ERER), *External Sustainability* (ES), dan *Macroeconomic Balance* (MB). IMF kemudian memberikan estimasi terhadap level *undervalued* dari RMB sebagai hasil dari tiga pendekatan tersebut. Jika menggunakan pendekatan ERER maka RMB *undervalued* sekitar 3%, 17% jika menggunakan pendekatan ES, dan 23% jika menggunakan pendekatan MB.

Dengan dasar tersebut, AS mulai melakukan dialog multilateral dengan beberapa negara seperti pada G-20 dan IMF untuk meningkatkan tekanan

terhadap Pemerintah Cina untuk melakukan revaluasi terhadap mata uangnya. Cina sendiri telah melakukan revaluasi sejak tahun 2005-2008 dengan menaikkan level RMB 8.28 RMB/Dollar menjadi 6.28 RMB/Dollar, dan pada tahun 2010-2013 dari level 6.28 RMB/Dollar menjadi 6.17 RMB/Dollar. Namun, menurut AS revaluasi RMB yang dilakukan Cina masih belum cukup karena AS hingga saat ini masih mengalami defisit neraca perdagangan, sehingga AS berusaha menterjemahkan “manipulasi mata uang” sebagai tindakan *countervailing* dan *anti-dumping* dalam perdagangan yang dianggap melanggar peraturan WTO. Dari sisi Cina sendiri justru hal tersebut melanggar peraturan WTO, karena WTO memperbolehkan negara untuk melakukan tindakan atau membuat hukum perdagangan untuk melindungi perekonomiannya, selain itu tidak adanya aturan atau definisi yang jelas mengenai “manipulasi” mata uang baik dalam peraturan di *US Treasury*, IMF maupun di WTO akan menyulitkan AS untuk menuntut Cina. Sebaiknya AS fokus dalam meningkatkan produksi negara atau segera mendefinisikan mengenai *fair currency* atau *currency manipulation* dalam peraturan *US Treasury* atau dalam perjanjian perdagangan dengan mitra dagangnya.

## 5.2 Saran

Pada penelitian ini penulis hanya fokus untuk menggambarkan apa implikasi dari adanya proteksi ekonomi Cina melalui revaluasi RMB terhadap kerjasama perdagangan AS – Cina pada tahun 2009-2014, seperti yang dijelaskan diatas bahwa revaluasi RMB sendiri terjadi karena adanya dorongan dari AS karena nilai Cina dianggap *undervalued* dan membuat barang-barang AS tidak dapat bersaing dengan barang Cina bahkan dinegaranya sendiri. Namun dalam penelitian ini penulis tidak fokus membahas mengenai mengapa mata uang Cina dianggap sangat *undervalued* dan apa pendekatan yang paling efektif untuk mengetahui apakah suatu mata uang *undervalued* atau *overvalued* terhadap mata uang asing.

